

ANALISIS PRIORITAS PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LAMONGAN MENGUNAKAN METODE AHP-SAW

Mohammad Nurul Alamin¹, Aris Alfian², Ahmad Isro'il³,
Rihatul Janah⁴, Shyndy Sarwinda Mas Ayu⁵

¹Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Billfath,
Kompleks Pondok Pesantren Al Fattah, Siman, Sekaran, Lamongan, 62261
Email: alamvenom45@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan bentuk geografis dan demografisnya, Kabupaten Lamongan memiliki banyak potensi yang dapat dioptimalkan. Pemerintah dalam fungsinya sebagai "pelayanan publik" diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya pemerintah harus mampu menentukan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas bidang pembangunan di Kabupaten Lamongan. Dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW) serta dengan mengadopsi model skema penilaian Program Holistik Pembinaan dan Pengembangan Desa (PHP2D) tahun 2020, diperoleh kesimpulan bahwa urutan prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan adalah A₂ (pendidikan), disusul program A₇ (pariwisata), A₁ (kesehatan), A₃ (ketahanan dan keamanan pangan), A₅ (budaya dan seni), A₆ (industri kreatif), dan A₄ (energi baru dan terbarukan). Dengan diketahui program prioritas pembangunan ini akan membantu pemerintah dalam pengalokasian sumberdaya yang dimiliki.

Kata kunci: Prioritas Pembangunan, Analytical Hierarchy Process, Simple Additive Weighting, PHP2D

ABSTRACT

Based on its geographic and demographic form, Lamongan Regency has a lot of potentials that can be optimized. The government in its function as a "public service" is expected to be able to improve welfare, prosperity, security, justice, and peace for the community. To make it happen, the government must be able to determine development based on priority scales. This study aims to determine priorities in the development sector in Lamongan Regency. By using the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Simple Additive Weighting (SAW) methods and by adopting the 2020 Program Holistik Pembinaan dan Pengembangan Desa (PHP2D) assessment scheme model, it is concluded that the priority order of development in Lamongan Regency is A₂ (education), followed by programs A₇ (tourism), A₁ (health), A₃ (food security and security), A₅ (culture and arts), A₆ (creative industries), and A₄ (new and renewable energy). This research will help the government to define a development priority program that will assist the government in allocating its resources..

Keywords: Development Priorities, Analytical Hierarchy Process, Simple Additive Weighting, PHP2D

PENDAHULUAN

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kawasan strategis yang tergabung dalam Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 Km² setara 181.280 Ha atau \pm 3.78 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km. Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Jombang dan Kab. Mojokerto
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban.

Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan secara geografis terletak pada 6° 51' 54" sampai dengan 7° 23' 6" Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 112° 4' 41" sampai 112° 33' 12" bujur timur. Wilayah Kabupaten Lamongan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi tiga karakteristik yaitu:

1. Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Sarirejo dan Kembang bahu.
2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokoro.
3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.

(Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, 2017)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 *juncto* Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi sudah mulai efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Dengan begitu, Pemerintah Daerah memiliki peranan yang sangat tinggi dalam mengembangkan potensi daerahnya. Agar dapat mengembangkan potensi daerahnya secara efektif dan efisien, Pemerintah Daerah perlu menentukan prioritas pembangunan.

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan kewenangan yang sangat strategis. Kedudukan yang strategis ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Dalam Riyadi & Bratakasuma (2004: 8) dijelaskan Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan berkaitan dengan pengertian ini maka, Soemendar (1985:1) dalam (Sayafie 2011:8) menyatakan bahwa, Pemerintah sebagai badan yang penting dalam suatu pemerintahan, harus memperhatikan ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh

lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Berdasarkan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Infrastruktur Kabupaten Lamongan Tahun 2017/2021 dalam (Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, 2017) sektor unggulan Kabupaten Lamongan tersebut antara lain:

1. Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan perikanan,
2. Sektor industri pengolahan (khususnya sub sektor industri tanpa migas: industri tekstil, barang kulit, barang kayu, kertas dan barang cetakan),
3. Sektor bangunan / konstruksi,
4. Sektor perdagangan, hotel dan restoran (khususnya sub sektor perdagangan besar dan eceran dan sub sektor hotel),
5. Sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, serta
6. Sektor jasa (khususnya sub sektor sosial dan kemasyarakatan, hiburan, rekreasi, dan perorangan dan rumah tangga).

Di sisi lain, Pemerintah mengadakan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) yang merupakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa dalam bentuk kegiatan pemberian dana terhadap program yang menjadi prioritas pembangunan di suatu daerah. Program ini menuntut mahasiswa untuk menganalisis prioritas pembangunan di suatu desa. Program ini memiliki skema yang jelas dalam menilai analisis prioritas pembangunan sehingga skema tersebut dapat diadopsi dalam menentukan prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Dengan menentukan prioritas pembangunan ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengutamakan pembangunan terhadap beberapa bidang yang berpotensi dalam memajukan kabupaten lamongan terutama pada Sumber Daya Manusianya.

METODE

Pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2021 di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan di Desa Made, Lamongan, lamongan, Jawa Timur.

Penelitian ini berdasarkan teori pengambilan keputusan, hasil survey dan berdasarkan skema penilaian PHP2D di “Panduan Program Holistik Pembinaan dan Pengembangan Desa tahun 2020”.

Dalam penelitian ini diasumsikan ruang lingkup pembangunan Kabupaten Lamongan, meliputi:

1. Kesehatan,
2. Pendidikan,
3. Ketahanan dan Keamanan Pangan,
4. Energi baru dan terbarukan,
5. Budaya dan Seni,
6. Industri Kreatif, dan
7. Pariwisata,

Tahap kegiatan dilakukan berdasarkan kerangka berfikir kritis yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka berfikir

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan metode yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ada banyak metode yang digunakan untuk menentukan SPK, diantaranya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu AHP (*Analitycal Hierarchy Process*) dan SAW (*Simple Additive Weighting*). Metode

Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai Sistem Pendukung Keputusan untuk mencari kenormalan dan kekonsistenan dari kriteria dan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* untuk mendapatkan alternatif terbaik yang menjadi prioritas pembangunan di Lamongan.

AHP merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Masalah yang kompleks dipecah menjadi kelompok-kelompok sehingga terbentuk suatu hirarki. Pada tahap pengambilan keputusan, penelitian ini memakai metode Sistem Pengambilan Keputusan *AHP (Analytical Hierarchy Process)* dan *SAW (Simple Additive Weighting)*. *AHP* dapat dilakukan dengan langkah - langkah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi masalah dan kemudian membentuk struktur hirarkinya.
2. Membuat tabel/matrik perbandingan berpasangan antar kriteria.
3. Mencari matriks normalisasi.
4. Mengalikan matriks perbandingan semula dengan matriks nilai rata-rata.
5. Melakukan pengukuran konsistensi dengan cara menghitung:

- a. eigen maksimum (λ_{maks}) berdasarkan total kolom pada matriks perbandingan
- b. *Consistency Indeks (CI)*

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1}$$

- c. *Consistency Ratio (CR)*

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Dimana:

$CR = Consistency Ratio$

$CI = Consistency Indeks$

$RI = Random Index$

n : jumlah elemen/kriteria

Sedangkan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. metode *SAW (Simple Additive Weighting)* dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Mendapatkan bobot preferensi (W) dan matriks X .

2. Menormalisasikan tabel/matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dan alternatif.

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij}}{\max_i x_{ij}}, & \text{jika } j \text{ adalah atribut keuntungan (benefit)} \\ \frac{\min_i x_{ij}}{x_{ij}}, & \text{jika } j \text{ adalah atribut biaya (cost)} \end{cases}$$

Dimana:

r_{ij} : Rating kinerja ternormalisasi

\max_i : Nilai maksimum dari setiap baris dan kolom

\min_i : Nilai minimum dari setiap baris dan kolom.

x_{ij} : Baris dan kolom dari matriks

r_{ij} : adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif A_i pada atribut C_j ; $i = 1, 2, \dots, m$ dan $j = 1, 2, \dots, n$.

3. Menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif (V_i) diberikan sebagai:

$$V_i = \sum_{j=1}^n W_j r_{ij}$$

Dimana:

V_i : Nilai akhir dari alternatif

W_j : Bobot yang telah ditentukan

r_{ij} : Normalisasi matriks

4. Membuat perankingan dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Nilai V_i yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif A_i lebih terpilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menerapkan metode AHP dan SAW didapatkan hasil berikut,

Metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan dalam metode AHP antara lain:

1. Melakukan identifikasi masalah dan kemudian membentuk struktur hirarkinya. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan pemilihan program yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan dianggap sebagai kriteria dan program yang diusulkan dianggap sebagai alternatif. Menggunakan kriteria dan alternatif yang tercantum dalam panduan PHP2D, diperoleh kriteria dan alternatif berikut:

Tabel 1. Daftar kriteria, subkriteria dan bobot penilaian prioritas pembangunan yang digunakan.

Kode Kriteria	Jenis Kriteria	Sub Kriteria	Bobot
C ₁	Ketepatan dan kecermatan identifikasi masalah dan objek sasaran.		
C ₂	Ketepatan memilih metode pengembangan, kekuatan relevansi program dan kekuatan relevansi dengan OPD	Mutlak sesuai Sangat sesuai Sesuai Kurang sesuai Tidak sesuai	5 4 3 2 1
C ₃	Peluang program selesai ontime dan Rencana pasca program		
C ₄	Potensi Khusus		

Alternatif dalam perhitungan ini adalah:

- A₁ = Program kesehatan.
- A₂ = Program pendidikan.
- A₃ = Program ketahanan dan keamanan pangan
- A₄ = Program energi baru dan terbarukan.
- A₅ = Program budaya dan seni.
- A₆ = Program industri kreatif.
- A₇ = Program pariwisata.

- Membuat tabel/matrik perbandingan berpasangan antar kriteria. Merujuk pada panduan PHP2D diperoleh bobot kriteria penilaian berikut,

Tabel 2. Bobot setiap kriteria

Kriteria	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
Bobot	40%	30%	20%	10%

Sehingga didapatkan,

Tabel 3. Tingkat kepentingan setiap kriteria

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
C ₁	$\frac{40\%}{40\%} = 1$	3/4	2/4	1/4
C ₂	$\frac{40\%}{30\%} = \frac{4}{3}$	1	2/3	1/3
C ₃	2	3/2	1	1/2
C ₄	4	3	2	1
Total	8,3333	6,25	4,1667	2,0833

- Mencari matriks normalisasi dengan membagi nilai di setiap kolom dengan total nilai semua kolom dari tabel 3.

Tabel 4. Normalisasi matriks perbandingan

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄

C ₁	0,12	0,12	0,12	0,12
C ₂	0,16	0,16	0,16	0,16
C ₃	0,24	0,24	0,24	0,24
C ₄	0,48	0,48	0,48	0,48
Total	1,00	1,00	1,00	1,00

- Menjumlah nilai dari setiap baris kemudian dibagikan dengan jumlah elemen sehingga menghasilkan nilai rata-rata.

Tabel 5. Nilai rata-rata (mean) masing-masing baris

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	Total	Mean
C ₁	0,12	0,12	0,12	0,12	0,48	0,12
C ₂	0,16	0,16	0,16	0,16	0,64	0,16
C ₃	0,24	0,24	0,24	0,24	0,96	0,24
C ₄	0,48	0,48	0,48	0,48	1,92	0,48
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00

- Mengalikan matriks perbandingan semula (tabel 3) dengan matriks nilai rata-rata. diperoleh:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,75 & 0,50 & 0,25 \\ 1,3333 & 1 & 0,6667 & 0,3333 \\ 2 & 1,50 & 1 & 0,50 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,12 \\ 0,16 \\ 0,24 \\ 0,48 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,48 \\ 0,639988 \\ 0,96 \\ 1,92 \end{bmatrix}$$

- Melakukan pengukuran konsistensi dengan cara sebagai berikut:

- Menghitung nilai eigen maksimum (λ_{maks}) berdasarkan total kolom pada matriks perbandingan (pada gambar 4.3):

$$\lambda_{maks} = 0,48 + 0,639988 + 0,96 + 1,92 = 3,999988$$

- Menghitung *Consistency Indeks* dengan rumus:

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1} = \frac{3,999988 - 4}{3} = \frac{-0,000012}{3} = -0,000004$$

Dimana:

n = jumlah elemen/kriteria

- Menghitung *Consistency Ratio* dengan nilai rata-rata *Random Indeks* sesuai dengan tabel tetapan dibawah ini:

Tabel 6. Nilai rata-rata *Random Index (RI)*

Ordo Matriks (n)	Random Index	Ordo Matriks (n)	Random Index
1	0,00	9	1,45
2	0,00	10	1,49
3	0,58	11	1,51
4	0,90	12	1,54
5	1,12	13	1,56
6	1,24	14	1,57
7	1,32	15	1,59
8	1,42		

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{-0,000004}{0,90} = -0,0000444$$

Dimana:

$CR = Consistency Ratio$

$CI = Consistency Indeks$

$RI = Random Index$

- d) Memeriksa konsistensi hierarki. Suatu data dikatakan konsisten jika memiliki nilai konsistensi (*Consistency Ratio*) kurang atau sama dengan 0,1. Karena diperoleh nilai *Consistency Ratio* = -0,0000444 (kurang dari 0,1), maka data kriteria/atribut kegiatan pemilihan program yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan bisa dikatakan konsisten.

Metode Simple Additive Weighting (SAW).

Menerapkan langkah – langkah yang digunakan dalam metode SAW, diperoleh:

1. Mendapatkan bobot preferensi (W) dan matriks X . Bobot preferensi diperoleh dari bobot kriteria dan matriks X diperoleh dari penjumlahan dari hasil perkalian bobot preferensi dengan data survei yang diperoleh.

$$W = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}; X = \begin{pmatrix} 78 & 77 & 78 & 80 \\ 82 & 80 & 81 & 81 \\ 80 & 74 & 78 & 81 \\ 67 & 68 & 69 & 73 \\ 78 & 76 & 75 & 84 \\ 77 & 72 & 77 & 77 \\ 80 & 77 & 80 & 81 \end{pmatrix}$$

2. Menormalisasikan matriks keputusan. Karena kriteria berupa atribut *benefit* maka memakai

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max_i x_{ij}}$$

Tabel 7. Tabel awal sebelum ter-normalisasi

Alternatif	Kriteria			
	C_1	C_2	C_3	C_4
A_1	78	77	78	80
A_2	82	80	81	81
A_3	80	74	78	81
A_4	67	68	69	73
A_5	78	76	75	84
A_6	77	72	77	77
A_7	80	77	80	81
Max	82	80	81	84

Sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R Sebagai Berikut:

Tabel 8. Tabel matriks ternormalisasi R

Alternatif	Kriteria			
	C_1	C_2	C_3	C_4
A_1	0,9512	0,9625	0,9630	0,9524
A_2	1,0000	1,0000	1,0000	0,9643
A_3	0,9756	0,9250	0,9630	0,9643
A_4	0,8171	0,8500	0,8519	0,8690
A_5	0,9512	0,9500	0,9259	1,0000
A_6	0,9390	0,9000	0,9506	0,9167
A_7	0,9756	0,9625	0,9877	0,9643

3. Mengalikan hasil perhitungan matriks keputusan ternormalisasinya dengan nilai W_j dan menghasilkan fungsi V_i , sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Tabel hasil dari fungsi V_i

V_i	Kriteria				Total
	$W_1 C_1$	$W_2 C_2$	$W_3 C_3$	$W_4 C_4$	
V_1	$4 \cdot 0,9512 = 3,8049$	$4 \cdot 0,9625 = 2,8875$	1,9259	0,9524	9,5707
V_2	4,0000	3,0000	2,0000	0,9643	9,9643
V_3	3,9024	2,7750	1,9259	0,9643	9,5677
V_4	3,2683	2,5500	1,7037	0,8690	8,3914
V_5	3,8049	2,8500	1,8519	1,0000	9,5067
V_6	3,7561	2,7000	1,9012	0,9167	9,2740
V_7	3,9024	2,8875	1,9753	0,9643	9,7295

4. Membuat perankingan dari nilai terbesar ke nilai terkecil.

Tabel 10. Tabel perankingan hasil dari fungsi V_i

V_i	Kriteria				Total	Ranking
	$W_1 C_1$	$W_2 C_2$	$W_3 C_3$	$W_4 C_4$		
V_1	3,8049	2,8875	1,9259	0,9524	9,5707	3
V_2	4,0000	3,0000	2,0000	0,9643	9,9643	1
V_3	3,9024	2,7750	1,9259	0,9643	9,5677	4
V_4	3,2683	2,5500	1,7037	0,8690	8,3914	7
V_5	3,8049	2,8500	1,8519	1,0000	9,5067	5
V_6	3,7561	2,7000	1,9012	0,9167	9,2740	6
V_7	3,9024	2,8875	1,9753	0,9643	9,7295	2

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai terbesar ada pada V_2 yaitu 9,964, sehingga alternatif A_2 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain program pendidikan yang berhak menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan Pemerintah Daerah kabupaten Lamongan, disusul program A_7 (pariwisata), A_1 (kesehatan), A_3 (ketahanan dan keamanan pangan), A_5 (budaya dan seni), A_6 (industri kreatif), dan A_4 (energi baru dan terbarukan).

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan diperoleh kesimpulan:

1. Menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* diperoleh hasil bahwa kriteria yang dipilih pada kegiatan pemilihan program yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan bisa dikatakan konsisten.
2. Menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* diperoleh hasil berupa urutan prioritas pembangunan kabupaten Lamongan yaitu, A_2 (pendidikan), disusul program A_7 (pariwisata), A_1 (kesehatan),

A_3 (ketahanan dan keamanan pangan), A_5 (budaya dan seni), A_6 (industri kreatif), dan A_4 (energi baru dan terbarukan).

Saran

1. Penelitian ini menggunakan program pembangunan lamongan berdasarkan asumsi. Jika digunakan program pembangunan Lamongan sesungguhnya akan diperoleh hasil yang lebih sesuai.
2. Penelitian selanjutnya akan jauh lebih baik jika data yang digunakan berdasarkan hasil survei penilaian kriteria oleh para pakar (profesional) yang ahli di bidangnya dan jika dikuatkan lagi dengan pengaruh yang terjadi pasca kegiatan pemilihan program yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan
3. Penelitian selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode Sistem Pengambilan Keputusan yang lain untuk membandingkan hasilnya.

REKOMENDASI

Pada jurnal ini menekankan pada data primer sehingga membutuhkan survei yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik terhadap para pakar di bidangnya maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakasuma, D.S. dan Riyadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. 2020. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2020*. URL:
<https://lamongankab.bps.go.id/publication/2020/05/20/9f0f35dddd8732b30f79bb40/kabupaten-lamongan-dalam-angka-2020.html>. Diakses tanggal 18 Februari 2021
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2020. *Pedoman Program Pembinaan dan Pemberdayaan Desa*. URL:
<https://php2d.kemdikbud.go.id/file/file-download/7Hmn5LM6EQIxu9QR.pdf>. Diakses pada 18 Februari 2021
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. 2017. *Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Infrastruktur Kabupaten Lamongan Tahun 2017/2021: Profil Kabupaten Lamongan*. URL:
<http://eprints.umm.ac.id/71859/4/BAB%20III.pdf>. Diakses tanggal 13 April 2021
- Sayafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Rineka Cipta.